

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu usaha yang menjadi penggerak perekonomian bagi sebagian besar masyarakat Indonesia adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kehadiran lembaga ini di Indonesia sangat menarik dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memberdayakan perekonomian Indonesia. Selain itu, UMKM juga dinilai sebagai salah satu bagian dalam memperkuat perekonomian masyarakat mengingat UMKM memiliki atribut yang solid, dinamis, dan produktif. UMKM saat ini memegang peranan penting dalam pembangunan moneter negara, dilihat dari situasi UMKM terutama sebagai pelopor di sektor keuangan dengan berbagai bidang usaha (Rizky, 2021).

UMKM harus mampu menumbuhkan perekonomian yang baik dan membuat daerah mampu menyediakan lapangan pekerjaan serta memiliki peluang untuk menciptakan sektor usaha moneter baru. Saat ini para pelaku usaha khususnya UMKM harus memiliki tata cara yang kokoh agar barang atau jasa yang dijual dapat diminati dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Hal ini menuntut adanya penguatan UMKM, agar UMKM di Indonesia mampu menciptakan barang yang lebih baik dan mampu bersaing dengan perusahaan mekanik besar yang bersaing baik di Indonesia maupun di luar negeri seperti pengembangan produk, administrasi, kualitas dan kemajuan administrasi dengan menggunakan bahan yang dapat diakses secara efektif dengan harga yang cukup murah, penciptaan sumber daya manusia dengan mengarahkan penyiapan pelaku UMKM agar mampu membangun inovasi, belajar

inovasi dan melakukan transaksi secara fisik maupun melalui media online (Darmasari, 2020).

Sektor UMKM dianggap memiliki potensi besar sebagai penggerak utama perekonomian suatu negara. Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi sebagai salah satu cara untuk mempercepat pembangunan daerah. Kehadiran sektor UMKM menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan sektor yang berperan besar dalam peningkatan daya serap tenaga kerja (Laila Fitria et al., 2024).

Kementerian Koperasi dan UKM RI menyebutkan bahwa pada tahun 2021 jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,7% atau senilai Rp8.573,89 triliun. UMKM juga tercatat menyerap dan menyediakan lapangan kerja bagi 97% dari angkatan kerja yang ada atau sekitar 117 juta tenaga kerja. UMKM memiliki daya tahan yang dapat menjadi andalan pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah krisis ekonomi global yang berdampak pada pelaku ekonomi menengah ke atas. Salah satu tugas UMKM adalah untuk pemeratakan taraf ekonomi rakyat. UMKM mampu membantu meningkatkan perolehan devisa negara karena pasarnya dapat menjangkau tingkat nasional dan internasional. Selain itu, UMKM juga menjadi salah satu sarana untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat (Wahyudiati & Isroah, 2018).

UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam menggerakkan perekonomian Indonesia sehingga UMKM menjadi penyedia lapangan pekerjaan pilihan dengan berbagai perkembangan yang tercipta dan dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Penerapan MEA memberikan kebebasan bagi para pelaku usaha untuk memiliki pilihan dalam bersaing dan membina UMKM secara luas dan adil, sehingga dapat menghasilkan produk yang sangat agresif serta memiliki tata kelola yang solid dan berkualitas (Janrosi, 2018).”

Manajemen yang solid dan berkualitas mendorong persaingan bisnis meningkat seiring dengan peningkatan UMKM. Dengan semakin berkembangnya persaingan, keuntungan yang diciptakan oleh organisasi akan memperjelas bahwa besaran penggunaan dalam besaran penciptaan bisnis pada umumnya akan memiliki jumlah yang sama dengan gaji yang diperoleh oleh organisasi. Organisasi dengan klasifikasi usaha kecil jika tidak dapat bersaing dengan organisasi lain akan kalah dalam persaingan. Untuk menyelesaikan latihan hierarkis dan mempertimbangkan untuk bersaing secara global, UMKM harus memiliki pilihan untuk melakukan administrasi keuangan yang memadai bagi para pengusaha UMKM (Darmasari, 2020).

Tugas UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah menciptakan hasil yang bernilai bagi daerah setempat. UMKM dihadapkan pada salah satu kendala yang umumnya terjadi dalam dunia usaha, terutama keterbatasan dalam membuat laporan keuangan. Setiap pergerakan yang dilakukan oleh UMKM memerlukan laporan keuangan yang mencerminkan praktik bisnisnya pada periode akuntansi (Rizky, 2021).

Seiring dengan perkembangan bisnis di Indonesia menuntut beberapa perubahan dalam dunia akuntansi dan keuangan, seperti perubahan peraturan akuntansi di Indonesia. Salah satu perubahan penting adalah perubahan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang merupakan pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan entitas bisnis. EP ini menggantikan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), SAK Entitas Privat ditujukan bagi entitas bisnis yang kepemilikannya terbatas dan tidak melakukan penawaran umum saham kepada publik serta menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement). Di era bisnis yang modern ini, penerapan SAK yang tepat bagi entitas bisnis privat sangat dibutuhkan agar dapat menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas untuk menjaga stabilitas bisnis dalam jangka panjang (Fatimah, 2023). Dengan adanya standar akuntansi yang baik maka transparansi dalam pelaporan keuangan melalui penyajian informasi keuangan perusahaan dapat dipercaya dan mudah dipahami. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi, mengingat melalui sosialisasi akan mendorong pemahaman yang baik tentang SAK.

Perkembangan dunia akuntansi tidak akan pernah ada habisnya, seperti hadirnya standar akuntansi keuangan (SAK) baru yaitu Entitas Privat (SAK EP) menggantikan SAK sebelumnya yaitu SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas (ETAP). Setelah berumur lebih dari 10 tahun, yaitu semenjak penerbitannya pada tahun 2009 oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), SAK ETAP kemudian diganti sejak disahkannya Draf Eksposur SAK EP pada tanggal 29 Juli 2020.

SAK Entitas Privat (SAK EP) adalah Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, standar ini yang akan menjadi pedoman dasar

bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum. SAK EP secara efektif mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2025 menggantikan SAK ETAP yang sebelumnya menjadi acuan dasar pengelolaan akuntansi dari berbagai industry. Salah satu alasan mengapa standar akuntansi ini digunakan adalah karena tujuan utamanya yaitu memberikan kemudahan bagi perusahaan berskala kecil dan menengah. (Andhika Pramudya, 2024) (IAI, n.d.).

SAK Entitas Privat ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) bagi pengguna eksternal. Namun demikian, entitas yang memiliki akuntabilitas publik dapat menggunakan SAK Entitas Privat jika otoritas berwenang regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK Entitas Privat (IAI, n.d.). SAK EP diterbitkan dengan berlandaskan standar akuntansi internasional IFRS for SMAs yang lebih sederhana namun lebih komprehensif dibandingkan SAK ETAP. Beberapa contoh yang termasuk entitas ini, seperti pengusaha UKM, bisnis keluarga, organisasi nirlaba, praktik profesional independen, entitas yang sahamnya tidak diperdagangkan secara publik, serta koperasi dan asosiasi (Andhika Pramudya, 2024).

Perencanaan dan penyusunan SAK EP mengacu pada contoh-contoh yang diadopsi IFRS for SMEs (IFRS for SMEs versi 2015 yang berlaku efektif 1 Januari 2017). Penerapan contoh tersebut perlu memperhatikan kesesuaian dengan praktik di Indonesia tentang UMKM. SAK EP ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan

umum bagi pengguna eksternal. Namun, entitas yang memiliki akuntabilitas publik dapat menggunakan SAK Entitas Privat jika otoritas regulasi mengizinkan penggunaan SAK Entitas Privat. Strategi SAK yang baru telah disetujui, sehingga perlu dilakukan sosialisasi, mengingat sosialisasi akan mendorong pemahaman yang baik terhadap SAK bagi pelaku UMKM (IAI, n.d.).

Keterbatasan mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan. Meskipun standar ini dirancang untuk menyederhanakan pelaporan keuangan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkannya. Tantangan ini mencakup aspek pemahaman akuntansi, keterbatasan sumber daya, penggunaan pencatatan keuangan yang masih konvensional, serta kurangnya insentif dari pemerintah.

Rendahnya implementasi SAK EP di UMKM disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, tingkat pendidikan pemilik dan pemahaman akuntansi. Penerapan standar ini dapat meningkatkan transparansi, akses pembiayaan, dan profesionalisme usaha. Diperlukan edukasi, insentif, dan dukungan teknologi untuk membantu UMKM beradaptasi dengan standar akuntansi yang lebih baik.

Menurut Wijayanti et al. (2020), Sosialisasi mengasumsikan bagian yang berfungsi dalam posisi atau pekerjaan tertentu di mata publik yang merupakan konsekuensi dari perjalanan individu untuk mendapatkan informasi, kemampuan, dan perspektif. Mentalitas yang dimiliki daerah tersebut adalah kecurigaan bahwa, uang tunai dapat digunakan untuk membeli bahan mentah, bahkan pembeli sering

kali hanya menggantikan biaya produksi untuk mengirimkan barang tersebut. Hal ini membuat keuntungan dan kemalangan menjadi tidak terlihat. Satu lagi kekurangan dari sisi moneter adalah banyak jaringan tidak memiliki pembukuan atau bukti pertukaran.

Terdapat faktor yang mempengaruhi pandangan atau persepsi pelaku usaha mengenai pentingnya laporan keuangan bagi perkembangan usaha yaitu tingkat pendidikan terakhir, dan latar belakang pendidikan. Tingkat pendidikan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Apabila sumber daya manusia rendah, maka pengelolaan laporan keuangan pada UMKM sangat mempengaruhi kemajuan suatu UMKM. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pelaku UMKM maka semakin tinggi pula tingkat penerapan laporan informasi akuntansi pada usahanya (Yudiantara, 2021).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zantika & Setyorini (2019), menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap praktik penyusunan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Rizal, dkk. (2019) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pelaksanaan penyusunan laporan keuangan. Menurut Rohmah (2016) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan. Dengan tingkat pendidikan yang baik akan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Adino (2019) dan Zantika & Setyorini (2019) menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berbasis SAK. Hal ini berbeda dengan penelitian

yang dilakukan oleh Budiman et al. (2017), Maharani (2020), Tuti & Dwijayanti (2020) yang menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berbasis SAK. Berdasarkan hasil beberapa penelitian terdahulu yang memberikan simpulan yang tidak konsisten, maka masih perlu dikaji ulang.

Penyusunan laporan keuangan yang memadai harus diikuti dengan pemahaman yang baik tentang akuntansi. Menurut Suprianto (2016) akuntansi sebagai suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan penelitian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut dan, pemahaman akuntansi memiliki peran penting dalam penyusunan laporan keuangan. Rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari para penyusun laporan keuangan itu sendiri.

Sejak berlakunya SAK-EMKM hingga berlakunya SAK-EP, pelaku UMKM dituntut untuk dapat menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Rumitnya pemahaman mengenai siklus akuntansi, membuat pelaku UKM tidak disiplin dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan. Belajar ilmu akuntansi memang tidak dapat dipahami secara langsung, namun harus bertahap sesuai prosedur akuntansi dan dengan menerapkan SAK dapat diharapkan dapat membantu pelaku UMKM membuat Laporan Keuangan yang berkualitas (Utami et al., 2020).

Beberapa faktor yang mampu mempengaruhi pelaku UMKM akhirnya menyusun laporan keuangannya berdasarkan standar yang telah ditetapkan

diantaranya adalah persepsi, tingkat pendidikan, dan ukuran usaha. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, terdapat beberapa penelitian yang mengambil topik implementasi SAK-EP oleh pelaku UMKM dan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah penelitian yang dilakukan oleh Janrosli (2018), Kristiawati (2020), Sulistyawati (2020), Parhusip (2020), Susilowati et al., (2021), Yudiantara (2021), dan (Farida & Larasati (2021)). Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian tersebut. Sehingga dengan pertimbangan masih terdapat inkonsistensi hasil, maka penelitian ini akan mengambil persepsi, tingkat pendidikan, dan ukuran usaha sebagai faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi implementasi SAK-EP pada laporan keuangan UMKM. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan mendukung penelitian yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya untuk mendapatkan jawaban yang konsisten terkait faktor apa saja yang memang terbukti dapat mempengaruhi implementasi SAK-EP oleh pelaku UMKM.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam dan terperinci bagaimanakah pengaruh sosialisasi SAK-EP, tingkat Pendidikan pemilik, dan pemahaman akuntansi terhadap implementasi SAK-EP, sehingga penulis membuat laporan magang dengan mengangkat judul ***“Pengaruh Sosialisasi SAK-EP, Tingkat Pendidikan Pemilik dan Pemahaman Akuntansi terhadap Implementasi PSAK-EP UMKM Kota Palembang”***.

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengkaji mengenai Pengaruh Sosialisasi SAK-EP, Tingkat Pendidikan Pemilik dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Implementasi SAK-EP pada UMKM di Kota Palembang. Berikut beberapa masalah yang diidentifikasi menjadi dasar penelitian ini berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan :

1. Banyak pemilik UMKM yang belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai pentingnya dan cara menerapkan SAK-EP dalam pencatatan keuangan mereka.
2. Sebagian besar pemilik UMKM tidak memiliki latar belakang akuntansi, sehingga mereka kesulitan dalam memahami dan menerapkan SAK-EP.
3. Pendidikan formal yang berbeda-beda di antara pemilik UMKM dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memahami dan mengadopsi standar akuntansi.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya penyimpangan yang terlalu meluas dalam penulisan laporan akhir maka penulis hanya membahas pada Pengaruh Sosialisasi SAK-EP, Tingkat Pendidikan Pemilik dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Implementasi SAK-EP pada UMKM di Kota Palembang. Dimana dalam penelitian ini penulis hanya tertuju pada UMKM sektor Kecil dan Menengah yang berada di wilayah Kota Palembang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah antara lain sebagai berikut :

1. Apakah sosialisasi SAK-EP berpengaruh terhadap implementasi SAK-EP?
2. Apakah Tingkat Pendidikan Pemilik berpengaruh terhadap implementasi SAK-EP ?
3. Apakah Pemahaman Akuntansi berpengaruh terhadap implementasi SAK-EP ?
4. Apakah terdapat pengaruh simultan antara sosialisasi SAK EP, Tingkat Pendidikan Pemilik, dan Pemahaman Akuntansi terhadap Implementasi SAK EP pada UMKM?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh sosialisasi SAK-EP terhadap implementasi SAK-EP pada UMKM di Kota Palembang
2. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan pemilik terhadap implementasi SAK-EP
3. Mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi pemilik UMKM berpengaruh terhadap implementasi SAK-EP

4. Mengetahui pengaruh simultan antara Sosialisasi SAK EP, Tingkat Pendidikan Pemilik, dan Pemahaman Akuntansi terhadap Implementasi SAK EP pada UMKM

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan tersebut, sehingga manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menjelaskan pemahaman serta menambah pengetahuan mengenai Pengaruh Sosialisasi SAK-EP, Tingkat Pendidikan Pemilik dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Implementasi SAK-EP pada UMKM di Kota Palembang

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, sehingga adanya suatu perkembangan dan pembaharuan yang lebih baik dari penelitian penulis terkait implementasi SAK-EP pada UMKM dan memperkaya literatur dalam bidang akuntansi dan keuangan terkait UMKM

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi UMKM

Memberikan pemahaman lebih baik mengenai pentingnya penerapan SAK-EP, membantu pemilik usaha dalam meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan keuangan

b. Bagi Masyarakat Umum

Memberikan pemahaman mengenai laporan keuangan yang dibuat oleh pelaku UMKM tidak hanya dapat menggunakan SAK EMKM, tetapi juga dapat menggunakan SAK-EP

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penafsiran dan menggapai tujuan yang dihendak, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi atau hal-hal yang dibahas didalam tiap-tiap bab. Penelitian ini terbagi menjadi lima bagian, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Pada bab ini penulis menguraikan teori dan ide-ide dasar yang akan digunakan untuk mendukung penelitian ini, serta penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis membahas pendekatan yang dipilih untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan, jenis penelitian, operasionalisasi variabel penelitian, populasi, sampel, metode

pengambilan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data untuk menguji hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis memaparkan variabel-variabel yang memengaruhi sosialisasi SAK-EP, tingkat pendidikan dan pemahaman akuntansi terhadap implementasi SAK-EP berdasarkan uji hipotesis dan hasil dari sampel yang diteliti.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dan saran dari hasil yang diperoleh dan diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

